

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara satu pihak (prinsipal) yang mempekerjakan pihak lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal, yang melibatkan pendelegasian sebagian wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen, dimana prinsipal dalam teori ini adalah para pemegang saham dan agen adalah pihak manajerial. Manajer perusahaan sering kali mengungkapkan informasi lebih detail, termasuk laporan keberlanjutan, untuk mengurangi perbedaan informasi antara pihak manajer dan pemilik perusahaan.

Konflik kepentingan dalam hubungan keagenan kerap terjadi ketika agen berpotensi mengambil keputusan atau tindakan yang tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal, yang pada gilirannya menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) (Rokhlinsari, 2016). Laporan keberlanjutan ini menjadi cara untuk menurunkan biaya yang timbul karena konflik kepentingan antara manajer dan pemilik dan menunjukkan bahwa manajemen beroperasi sesuai kepentingan semua pihak, baik pemilik maupun pemangku kepentingan lainnya.

Dalam konteks laporan keberlanjutan (*sustainability report*), teori ini digunakan untuk memahami bagaimana manajer melaporkan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan dan mengurangi konflik kepentingan (Yang *et al.*, 2025). Dalam penelitian ini, teori keagenan digunakan untuk menjelaskan variabel kepemilikan perusahaan yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik, dimana kepemilikan saham oleh pihak manajerial, institusional, maupun publik dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap aktivitas manajemen sehingga perusahaan terdorong untuk mengungkapkan *sustainability report* secara lebih transparan sebagai upaya mengurangi asimetri informasi dan konflik keagenan.

2. Teori *Stakeholder*

Menurut Freeman (1984) di dalam Darmawan & Idawati, (2023) menjelaskan bahwa *stakeholder* merupakan individu atau kelompok yang memiliki hubungan timbal balik dengan perusahaan, di mana mereka dapat memengaruhi maupun dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa teori yang berkaitan antara para pemangku kepentingan dengan entitas perusahaan atau organisasi (Darmawan & Idawati, 2023). Sedangkan menurut pandangan Ghazali dan Chairi (2017:409) menerangkan bahwa *stakeholder theory* merupakan pandangan bahwa perusahaan bukan hanya organisasi yang beroperasi untuk kepentingan internalnya saja, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak -pihak tersebut meliputi pemegang saham, kreditur, pemerintah, masyarakat, pemasok, analis, dan berbagai kelompok lainnya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab bukan hanya kepada petinggi atau pemegang saham saja, tetapi kepada masyarakat sekitar dan seluruh pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, konsumen, dan lingkungan sekitar juga. Perusahaan dituntut untuk mempertimbangkan semua pihak dalam menjalankan aktivitas perusahaan terutama yang terkena dampaknya, termasuk dalam pengungkapan *sustainability report*. Dengan adanya tekanan dari *stakeholder*, perusahaan akan didorong untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui *sustainability report* guna membangun kepercayaan dan citra yang positif di mata lingkungan.

Selain itu, tekanan dari pemangku kepentingan, seperti konsumen, media, dan masyarakat, dapat mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan (Sriani & Pratiwi, 2025). Dalam penelitian ini, teori *stakeholder* digunakan untuk menjelaskan variabel industri sensitif lingkungan dan industri dekat konsumen, dimana perusahaan yang aktivitas operasionalnya berdampak langsung terhadap lingkungan maupun memiliki interaksi langsung dengan konsumen akan menghadapi tekanan yang lebih besar dari *stakeholder* sehingga perusahaan cenderung meningkatkan transparansi melalui pengungkapan *sustainability report* guna menjaga citra dan kepercayaan publik.

3. Teori Legitimasi

Deegan, C. (2000) di dalam Rokhlinasari, (2016) menjelaskan menurut perspektif teori legitimasi, perusahaan cenderung secara sukarela mengungkapkan aktivitasnya apabila manajemen meyakini bahwa tindakan tersebut sesuai dengan harapan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh John Dowling dan Jeffrey Pfeffer (1975), legitimasi muncul ketika nilai-nilai yang melekat pada organisasi sejalan dengan nilai-nilai di lingkungannya apabila terdapat ketidaksesuaian, maka organisasi akan melakukan adaptasi untuk memperoleh kembali legitimasi.

Menurut Mark C. Suchman (1995), legitimasi merupakan persepsi umum atau asumsi bahwa tindakan suatu entitas dianggap layak, pantas, atau sesuai dengan sistem norma, nilai, keyakinan, dan definisi yang dibangun secara sosial. Dalam konteks ini, legitimasi bukan hanya sekadar pengakuan formal, tetapi juga mencakup penerimaan sosial yang luas terhadap perilaku organisasi. Sedangkan menurut Patten, (1991) dalam Wahyudi (2023) teori legitimasi merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan berupaya dalam menyelaraskan norma – norma yang ada di masyarakat sekitar dengan kegiatan operasional perusahaan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa teori legitimasi menjelaskan bahwa keberlanjutan dan penerimaan suatu organisasi atau perusahaan dalam lingkungan sosialnya ditentukan oleh sejauh mana aktivitas organisasi tersebut sesuai dengan sistem nilai, norma sosial, kepercayaan, dan definisi yang berkembang secara sosial. Perusahaan menggunakan *sustainability report* untuk memperoleh legitimasi sosial (O'Donovan, 2002). Laporan keberlanjutan dijadikan sebagai media komunikasi antar perusahaan dengan masyarakat sebagai wujud pertanggung jawaban sosial dan lingkungan guna menjaga kepercayaan publik.

Dalam penelitian ini, teori legitimasi digunakan untuk menjelaskan variabel agresivitas pajak dan regulasi pemerintah terhadap pengungkapan *sustainability report*. Pada variabel agresivitas pajak, perusahaan yang melakukan praktik penekanan pajak berpotensi memperoleh citra negatif dari masyarakat karena dianggap kurang menjalankan tanggung jawab sosialnya terhadap negara. Oleh karena itu, perusahaan akan meningkatkan transparansi pengungkapan *sustainability report* sebagai upaya memperoleh kembali legitimasi sosial. Sedangkan pada variabel regulasi pemerintah, perusahaan akan mematuhi kebijakan terkait kewajiban pengungkapan *sustainability report* guna memperoleh legitimasi dari regulator dan masyarakat. Kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah

menjalankan aktivitas operasional sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjaga reputasi dan keberlangsungan usaha perusahaan.

4. *Sustainability report*

a. Pengertian *Sustainability report*

Istilah *sustainability report* menurut Standar GRI 2021 juga merujuk pada proses penyusunan laporan yang dimulai dengan organisasi mengidentifikasi topik material berdasarkan dampak yang paling signifikan, dan diakhiri dengan publikasi informasi mengenai dampak tersebut kepada publik (GRI, 2021). Perusahaan tidak hanya dituntut untuk memenuhi target ekonominya saja, tetapi juga bagaimana suatu perusahaan mengelola dampak operasionalnya terhadap lingkungan dan sosial.

Selain untuk memenuhi keuntungan perusahaan (*profit*), perusahaan juga tetap harus memperhatikan kesejahteraan semua pihak terkait masyarakat (*people*) serta menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Konsep ini bertujuan agar perusahaan mampu menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas keseimbangan ini dimuat dalam sebuah laporan berkelanjutan atau disebut *sustainability report*.

Sustainability report merupakan dokumen yang disiapkan oleh perusahaan untuk menyampaikan secara transparan kinerja keberlanjutan mereka kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini mencakup tidak hanya aspek keuangan, tetapi juga aspek non-keuangan, termasuk pengaruh perusahaan terhadap lingkungan, sosial, dan praktik tata kelola (ESG) (Martusa & Meythi, 2025).

Sustainability report pada pengertian lain juga merujuk pada informasi yang disusun secara terstruktur, mencakup data keuangan maupun non-keuangan dengan tujuan untuk perbandingan kinerja perusahaan antara periode saat ini dengan periode sebelumnya (Darmawan & Idawati, 2023).

Tujuan pengungkapan *sustainability report* adalah memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana perusahaan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan serta mengelola dampak operasionalnya secara berkelanjutan (Martusa & Meythi, 2025). Pengungkapan informasi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh aktivitasnya yang dirasakan oleh lingkungan sekitar. Menurut teori *stakeholder*, menggambarkan pengungkapan *sustainability report* dapat memenuhi tekanan

dari para *stakeholder* juga sebagai upaya untuk menjadi dasar bagi para investor untuk pengambilan keputusan.

b. Prinsip *Sustainability report*

Dalam mencapai tujuan pelaporan keberlanjutan yang transparan dan akuntabel, perusahaan dituntut untuk mengikuti standar dan prinsip – prinsip yang telah ditetapkan. Acuan ini berdasarkan Standar GRI atau *Global Reporting Initiative*. Standar ini memuat indikator – indikator penting yang menjadi acuan perusahaan dalam menyusun dan mempublikasikan *sustainability report*. Menurut GRI, (2021) indikator dan prinsip dalam penyusunan *sustainability report* dibutuhkan untuk menganalisis keterlibatan para pemangku kepentingan dalam membuat suatu kebijakan atau prosedur dalam menerbitkan *sustainability report*.

Menurut GRI, (2021) terdapat dua kelompok prinsip yang dapat diterapkan, yaitu:

1) Prinsip Pelaporan *Sustainability report*

Menurut GRI, dalam proses pelaporan berkelanjutan perusahaan harus menerapkan beberapa prinsip agar laporan tersebut dianggap kredibel dan bermanfaat. Antara lain:

- a) Materialitas : laporan yang dibutuhkan harus memuat topik yang paling signifikan dalam perusahaan, meliputi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk dilaporkan.
- b) Keterlibatan pemangku kepentingan : laporan yang dibuat harus memenuhi ekspektasi atau harapan dari para *stakeholder*.
- c) Konteks keberlanjutan : laporan yang dibuat diharapkan mampu untuk menunjukkan bagaimana aktivitas operasional perusahaan dapat berhubungan dengan pembangunan yang berkelanjutan.
- d) Keterbandingan : data yang dimuat dalam laporan harus dapat dibandingkan antar periode maupun antar perusahaan.
- e) Kelengkapan : agar laporan yang dihasilkan tidak memiliki makna ganda atau menyesatkan, maka laporan yang dibuat harus memberikan gambaran secara positif, akurat, rinci, andal, dan tepat waktu.

2) Prinsip berdasarkan kualitas *Sustainability report*

Selain prinsip dalam pelaporan, GRI juga menekankan bahwa kualitas dari laporan yang dibuat juga harus benar – benar berguna bagi para *stakeholder*. Berikut beberapa prinsip yang digunakan untuk menghasilkan laporan yang berkualitas :

- a) Kejelasan : laporan yang disajikan harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti
- b) Keseimbangan : data dan informasi yang tersedia dalam laporan harus menyajikan aspek positif dan negatif secara proporsional dan tidak hanya berisi promosi saja.
- c) Keandalan : data dan informasi yang termuat dalam laporan harus dapat diverifikasi untuk dapat dipercaya kebenarannya. Perusahaan biasanya menggunakan pihak ketiga atau pihak independen seperti auditor independen untuk meninjau keandalannya.
- d) Keterbandingan : laporan keberlanjutan harus memungkinkan pembaca untuk membandingkan kinerja perusahaan antar periode atau dengan perusahaan lain. Untuk itu perusahaan biasanya menggunakan metode dan indikator yang konsisten dari tahun ke tahun.
- e) Ketepatan waktu : informasi yang dimuat dalam laporan harus diperbarui secara berkala dan dilaporkan atau dipublikasikan dengan tepat waktu, sehingga relevan dengan kondisi perusahaan terkini.
- f) Kelengkapan : laporan yang dihasilkan harus memuat seluruh informasi secara mendetail yang relevan dengan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan agar pemangku kepentingan dapat mengevaluasi kinerja perusahaan.

3) Standar dan Pengungkapan *mengevaluasi repot*

Laporan keberlanjutan berfungsi sebagai instrumen bagi organisasi untuk mengungkapkan secara transparan kinerja dan dampak mereka terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial (tiga pilar keberlanjutan), serta bagaimana tata kelola dan partisipasi pemangku kepentingan dijalankan. Dalam konteks Indonesia, pengungkapan ini telah diatur melalui SEOJK No.16/SEOJK.04/2021 yang mewajibkan emiten menyampaikan laporan keberlanjutan setiap tahun.

Dalam menyusun dan mengungkapkan *sustainability report* memerlukan sebuah acuan atau standar dalam menyusunnya, standar ini memuat indikator – indikator yang menjadi acuan dalam pengungkapan *sustainability report*. Standar ini disebut Standar GRI yang terbagi dalam 3 topik, antara lain :

a. Pengungkapan *Sustainability report* Terhadap Aspek Ekonomi (GR 200)

GRI 200 merupakan bagian dari GRI Standar yang fokus pada dampak ekonomi suatu organisasi terhadap pemangku kepentingan dan perekonomian secara umum. Standar ini tidak hanya menilai kinerja finansial organisasi, tetapi juga bagaimana organisasi tersebut berkontribusi pada perekonomian lokal dan global, serta bagaimana mereka mengelola isu-isu ekonomi yang relevan. Topik-topik yang termasuk dalam GRI 200 antara lain :

Tabel 2. 1 GRI 200

No GRI	Indikator GRI
201	Kinerja Ekonomi
202	Keberadaan Pasar
203	Dampak Ekonomi Tidak Langsung
204	Praktik Pengadaan
205	Anti Korupsi
206	Perilaku Anti Persaingan

b. *Sustainability report* Terhadap Aspek Lingkungan (GRI 300)

GRI 300 adalah bagian dari GRI Standard yang menekankan pengungkapan kinerja organisasi terkait dampak lingkungan yang dihasilkan dari operasionalnya. Pengungkapan ini membantu organisasi untuk menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem, dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan bertanggung jawab. Selain itu, pengungkapan GRI 300 memberikan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan tentang strategi lingkungan organisasi, target pencapaian, dan hasil monitoring kinerja lingkungan yang terukur.

Standar GRI 300 mencakup indikator – indikator sebagai berikut :

Tabel 2. 2 GRI 300

No GRI	Indikator GRI
301	Material
302	Energi
303	Air dan Efluen
304	Keanekaragaman Hayati
305	Emisi
306	Efluen dan Limbah
307	Limbah
308	Penilaian Lingkungan Pemasok

c. *Sustainability report* Terhadap Aspek Sosial (GRI 400)

GRI 400 merupakan bagian dari GRI Standard yang mengatur pengungkapan terkait dampak sosial dari kegiatan operasional organisasi. Pengungkapan berdasarkan GRI 400 memungkinkan organisasi untuk menunjukkan bagaimana mereka menghormati hak-hak sosial dan memastikan kesejahteraan karyawan serta masyarakat sekitar.

Standar ini mencakup topik-topik antara lain :

Tabel 2. 3 GRI 400

No GRI	Indikator GRI
401	Kepegawaian
402	Hubungan Tenaga Kerja
403	Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
404	Pelatihan Dan Pendidikan
405	Keanekaragaman Dan Peluang Setara
406	Nondiskriminasi
407	Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif
408	Pekerja Anak
409	Kerja Paksa/ Wajib Kerja
410	Praktik Keamanan
411	Hak Masyarakat Adat
412	Penilaian Hak Asasi Manusia
413	Masyarakat Setempat
414	Penilaian Sosial Pemasok
415	Kebijakan Publik
416	Kesehatan Dan Keselamatan Pelanggan
417	Pemasaran Dan Pelabelan
418	Privasi Pelanggan
419	Kepatuhan Sosial Ekonomi

4) Kepemilikan Perusahaan

Kepemilikan perusahaan merujuk pada hak kepemilikan berupa surat berharga atau saham yang dimiliki oleh individu, entitas, maupun pemerintah. Adanya kepemilikan ini diharapkan mampu menambah modal perusahaan, sehingga perusahaan dapat berkembang lebih baik dan bersaing secara efektif dengan perusahaan lain (Wahyudi, 2023). Jensen dan Meckling menjelaskan bahwa perusahaan dapat dipandang sebagai kumpulan kontrak antara berbagai pemangku kepentingan, di mana konflik kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) menciptakan biaya agensi, seperti biaya pemantauan dan ikatan (*bonding costs*) untuk meminimalkan perilaku oportunistik (Jensen & Meckling, 1976).

Faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* yaitu struktur kepemilikan di perusahaan, baik kepemilikan manajerial, institusional, maupun publik. Berikut penjabarannya :

a. Kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial terjadi ketika manajer perusahaan memiliki sebagian saham, yang dapat mengurangi konflik agensi dengan menyelaraskan insentif mereka dengan pemilik. Kepemilikan manajerial cenderung meningkatkan kualitas pengungkapan karena manajer memiliki keterlibatan langsung dalam operasional (Arwidya, 2024).

Namun, kepemilikan manajerial yang tinggi dapat menimbulkan masalah *entrenchment*, di mana manajer menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi, seperti menghindari pengawasan eksternal. Hal ini sering terlihat dalam perusahaan keluarga atau yang didominasi oleh pendiri, yang mungkin mengabaikan kepentingan minoritas pemegang saham. Untuk itu pengungkapan *sustainability report* dapat menjadi alat bantu bagi pemilik untuk melihat kinerja pihak manajemen secara transparan.

b. Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional merujuk pada struktur kepemilikan saham perusahaan di mana entitas besar seperti dana pensiun, bank investasi, perusahaan asuransi, atau dana mutual memiliki sebagian besar saham, yang memungkinkan mereka untuk memainkan peran aktif dalam pengawasan

manajemen dan keputusan strategis perusahaan. Menurut Gillan dan Starks (2000), kepemilikan ini sering kali mendorong aktivisme pemegang saham untuk meningkatkan nilai perusahaan, termasuk melalui tekanan untuk praktik berkelanjutan seperti pengurangan emisi karbon, karena investor institusional memiliki sumber daya dan insentif untuk memantau risiko jangka panjang.

Hal ini disebabkan lembaga-lembaga tersebut memiliki kepentingan jangka panjang terhadap kinerja perusahaan dan reputasinya, sehingga mereka cenderung mendorong praktik tata kelola yang baik, pelaporan yang akurat, dan pengelolaan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial secara berkelanjutan.

c. Kepemilikan publik

Kepemilikan publik adalah struktur di mana saham perusahaan dimiliki oleh investor individu atau kelompok kecil yang tidak memiliki kontrol mayoritas, sehingga perusahaan terbuka untuk perdagangan di pasar saham. Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan publik merujuk pada struktur di mana saham perusahaan dimiliki oleh sejumlah besar investor individu atau pemegang saham kecil yang tersebar luas, yang berbeda dari kepemilikan oleh manajer atau entitas besar.

Dengan adanya kepemilikan publik yang besar ini, mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasinya secara transparan mengenai kinerja dari perusahaannya kepada para pemegang saham.

5) Tekanan *Stakeholder*

Tekanan *stakeholder* merujuk pada pengaruh atau tekanan yang diberikan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, seperti investor, karyawan, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat, untuk mendorong perusahaan melakukan praktik yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan (Freeman, 1984; Mitchell *et al.*, 1997). Dalam konteks pertemuan laporan keberlanjutan (*sustainability report*), tekanan ini sering kali mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) guna memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan dan menghindari risiko reputasi atau hukum (Sari *et al.*, 2022).

Pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), tekanan pemangku kepentingan menjadi semakin penting karena peraturan seperti Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 yang mengatur tentang ESG, sehingga tekanan ini dapat mempengaruhi keputusan manajemen untuk meningkatkan transparansi (Putri & Sari, 2023). Tekanan pemangku kepentingan dapat diklasifikasikan berdasarkan intensitasnya, mulai dari tekanan langsung seperti tuntutan dari regulator hingga tekanan tidak langsung seperti ekspektasi masyarakat melalui media sosial.

Pada perusahaan BEI, penelitian menunjukkan bahwa tekanan dari pemangku kepentingan utama seperti investor institusional dan pemerintah cenderung lebih kuat pada industri yang memiliki dampak tinggi terhadap lingkungan atau konsumen, sehingga mempengaruhi frekuensi dan kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan (Wulandari & Sari, 2024). Hal ini didukung oleh teori *stakeholder*, yang menjelaskan bahwa perusahaan merespons tekanan dan ekspektasi pemangku kepentingan dengan meningkatkan transparansi melalui pengungkapan keberlanjutan (Freeman, 1984). Dalam penelitian ini, tekanan *stakeholder* dibagi menjadi dua yaitu :

a. Industri Sensitif Lingkungan

Industri sensitif lingkungan merupakan perusahaan yang kegiatan operasionalnya memiliki risiko dampak yang dapat memengaruhi lingkungan sekitar. Industri ini seperti pertambangan, energi, dan manufaktur berat, mengalami tekanan besar dari para pemangku kepentingan akibat operasi mereka yang sering kali memberikan dampak langsung pada ekosistem, termasuk polusi udara, udara, dan tanah. Oleh karena itu, pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), dan masyarakat setempat meminta menyebarkan informasi yang transparan (Sari *et al.*, 2022).

Tekanan ini juga terlihat dalam indikator seperti keterlibatan perusahaan dalam program global seperti UN *Global Compact* atau CDP (*Carbon Disclosure Project*), di mana perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) cenderung memberikan penutupan yang lebih mendalam sebagai respons untuk menghindari risiko hukum atau pemboikotan (Putri & Sari, 2023). Menurut Sari dkk. (2022), indikator utama tekanan dari pemangku kepentingan dalam industri ini mencakup volume keluhan

masyarakat, frekuensi pemeriksaan oleh regulator, serta desakan dari investor yang peduli lingkungan, yang secara signifikan mempengaruhi saling cakupan.

b. Industri Dekat Konsumen

Industri dekat konsumen merupakan suatu usaha dari organisasi atau perusahaan yang berlokasi tidak jauh dari konsumen atau masyarakat. Karena jaraknya yang dekat, aktivitas perusahaan ini kerap menimbulkan dampak atau mengganggu lingkungan sekitar. Industri yang dekat konsumen, seperti sektor ritel, makanan dan minuman, serta farmasi, menghadapi tekanan dari pemangku kepentingan termasuk konsumen akhir, pemasok, dan regulator. Tekanan ini menekankan pentingnya keamanan produk, etika dalam rantai pasokan, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Akibatnya, perusahaan-perusahaan tersebut terdorong untuk menyusun laporan keberlanjutan yang menyoroti praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab (Putri & Sari, 2023).

Pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dalam sektor ini antara tahun 2020–2025, tekanan pemangku kepentingan tercermin dalam berbagai inisiatif yang meliputi peningkatan kesejahteraan karyawan, diversifikasi produk, serta pengurangan limbah kemasan. Upaya tersebut berkontribusi pada peningkatan kepercayaan konsumen sekaligus menciptakan diferensiasi di pasar (Wulandari & Sari, 2024). Menurut Putri & Sari (2023), indikator utama dari tekanan pemangku kepentingan mencakup jumlah keluhan konsumen melalui media sosial, partisipasi perusahaan dalam sertifikasi seperti ISO 26000, serta tekanan dari investor yang menekankan kriteria ESG, yang secara nyata memengaruhi intensitas dan frekuensi pengungkapan informasi keberlanjutan perusahaan.

6) Agresivitas Pajak

a. Pengertian Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan berbagai strategi yang bisa berada dalam kerangka hukum (*tax avoidance*) maupun yang melanggar aturan (*tax evasion*). Agresivitas pajak menjadi salah satu upaya perusahaan dalam meminimalkan pajak dengan cara merencanakan pajak yang agresif. Agresivitas pajak sering kali menjadikan perusahaan memiliki

citra negatif dimata masyarakat (Frank *et al*, 2009). Untuk mengimbangnya, perusahaan melakukan pengungkapan *sustainability report* sebagai bentuk legitimasi.

b. Faktor Yang Mendorong Agresivitas Pajak

Faktor – faktor yang mempengaruhinya suatu perusahaan melakukan agresivitas pajak meliputi perusahaan yang memiliki *Return on Assets* (ROA) yang tinggi dan perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas rendah (PajakOnline.com). Perusahaan dengan *Return on Assets* (ROA) yang tinggi umumnya menghadapi beban pajak yang cukup besar, sehingga mereka terdorong untuk menerapkan strategi perencanaan pajak yang agresif demi mempertahankan laba bersih.

Selain itu, perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas rendah cenderung mengambil langkah-langkah agresif dalam pengelolaan pajak untuk menjaga arus kas dan meminimalkan beban pajak yang dapat mengurangi ketersediaan dana operasional. Dengan demikian, baik tingkat profitabilitas maupun kondisi likuiditas perusahaan dapat memengaruhi perilaku perpajakan mereka.

c. Indikator Agresivitas Pajak

Menurut Frank *et al*. (2006) dalam Wahyudi (2023), agresivitas pajak diartikan sebagai upaya perusahaan dalam memanipulasi atau merekayasa penghasilan kena pajak melalui berbagai bentuk perencanaan pajak. Tingkat *Effective Tax Rate* (ETR) yang rendah, di mana rasio antara pajak yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak menunjukkan bahwa perusahaan mungkin menerapkan strategi untuk menekan beban pajak.

Menurut Hindun dan Kodir (2020) menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai *Effective Tax Rate* (ETR), maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, tingkat agresivitas pajak dapat menjadi ukuran sejauh mana perusahaan dengan beban pajak tinggi berupaya mengatur kewajibannya, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat pengungkapan dalam laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

7) Tekanan Regulasi Pemerintah

Tekanan regulasi pemerintah dapat diartikan sebagai bentuk dorongan atau kewajiban yang diberikan oleh otoritas melalui peraturan perundang-

undangan agar perusahaan mematuhi standar tertentu, termasuk dalam hal pelaporan keberlanjutan (*sustainability report*) (Sutrisno, 2020). Salah satu bentuk implementasinya di Indonesia adalah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Regulasi memiliki peran penting dalam mendorong pengungkapan *sustainability report*. POJK No. 51/POJK.03/2017 mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menerapkan keuangan berkelanjutan. Regulasi ini meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam menyajikan *sustainability report*, sehingga tekanan regulasi dapat menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat pengungkapan (Widiowati & Mutmainah, 2023).

Tekanan regulasi dapat diukur melalui beberapa indikator. Berikut beberapa indikator tekanan regulasi berdasarkan OJK, (2017) antara lain :

- a. Tingkat kepatuhan : Tekanan regulasi dikategorikan tinggi apabila tingkat kepatuhan perusahaan mendekati 100%, yang mencerminkan efektivitas penerapan dan pengawasan regulasi tersebut dalam mendorong transparansi pelaporan keberlanjutan.
- b. Jumlah dan Intensitas Sanksi atau Penalti : semakin sering sanksi tersebut diterapkan, semakin tinggi pula intensitas tekanan yang diberikan oleh otoritas untuk memastikan kepatuhan terhadap pelaporan keberlanjutan.
- c. Kualitas dan Kelengkapan Pengungkapan : Tekanan regulasi dianggap efektif ketika kualitas pengungkapan perusahaan meningkat, misalnya dengan peralihan dari laporan yang bersifat deskriptif menjadi laporan yang memuat data kuantitatif.
- d. Dampak pada Perilaku Perusahaan dan *Stakeholder* : Tekanan regulasi tercermin dari perubahan praktik bisnis, misalnya peningkatan investasi ramah lingkungan atau respons positif pemangku kepentingan terhadap pengungkapan, di mana partisipasi aktif perusahaan dalam mengadopsi prinsip keberlanjutan menunjukkan efektivitas tekanan tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil
1.	(Tyasa & Taqwa, 2023)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Media Visibility dan Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan <i>Sustainability report</i> pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial secara signifikan meningkatkan pengungkapan laporan keberlanjutan, visibilitas media tidak memiliki dampak yang terlihat pada pengungkapan laporan keberlanjutan, dan usia perusahaan memiliki efek positif yang signifikan pada pengungkapan laporan keberlanjutan.
2.	(Astianata & Putra, 2023)	Pengaruh Agresivitas Pajak, Kinerja Lingkungan, Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan CSR Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2021	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> (CSR), kinerja lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> (CSR), dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> (CSR).
3.	(Arwidya, 2024)	Dampak Kepemilikan Saham Pada Pengungkapan <i>Sustainability Reporting</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi dan Sektor Bahan Baku yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mempengaruhi pengungkapan <i>sustainability report</i> . Sedangkan kepemilikan institusional dan asing tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan.
4.	(Alfiani, 2025)	Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sementara itu, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan karena fokus utama investor institusional lebih pada

		Pengungkapan <i>Corporate Sosial Responsibility</i> (CSR) Pada Perusahaan Sektor <i>Healthcare</i> Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2019-2023	kinerja keuangan dibanding aspek keberlanjutan. Namun, secara simultan ketiga variabel tersebut bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR, yang menunjukkan adanya hubungan dinamis antara struktur kepemilikan dan karakteristik perusahaan dalam mendorong transparansi sosial dan keberlanjutan.
5.	(Saptowinarko Prasetyo, 2024)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Sosial Responsibility</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kepemilikan institusional, manajerial, dan asing berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
6.	(Sulaksono <i>et al.</i> , 2023)	Determinan Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Sebagai Variabel Moderasi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan dan variabel profitabilitas, likuiditas, ukuran Perusahaan, umur Perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Peran Dewan Komisaris terbukti memoderasi pengaruh variabel Profitabilitas terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.
7.	(Alfajar & Taqwa, 2024)	Pengaruh Tekanan <i>Stakeholder</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Sustainability report Assurance</i> : Studi Empiris pada Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2017-2021	Penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan lingkungan dan tekanan dari karyawan berpengaruh positif terhadap <i>sustainability report assurance</i> . Sebaliknya, tekanan dari pemerintah dan ukuran perusahaan justru berpengaruh negatif, menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar atau menghadapi tekanan regulasi cenderung kurang terdorong untuk melakukan <i>assurance</i> atas laporan keberlanjutan mereka.
8.	(Sriani & Pratiwi, 2025)	<i>Stakeholder Pressure And</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan dari lingkungan, konsumen,

		<i>Sustainability report Quality</i>	dan media, mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan. Ukuran perusahaan tidak mempengaruhi tekanan lingkungan dan pemegang saham, tetapi mempengaruhi tekanan karyawan dan media, dan tekanan konsumen lebih besar.
9.	(Saputro <i>et al.</i> , 2022)	Pengaruh Tekanan <i>Stakeholder</i> terhadap Transparansi <i>Sustainability report</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai jenis tekanan <i>stakeholder</i> mempengaruhi transparansi laporan keberlanjutan. Sebaliknya, industri yang dekat dengan konsumen menguntungkan karena perusahaan berusaha mempertahankan reputasi dan meningkatkan kepercayaan publik melalui keterbukaan laporan.
10.	(Wahyudi, 2023)	Pengaruh Kepemilikan Perusahaan, Tekanan <i>Stakeholders</i> , Dan Agresivitas Pajak Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability report</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan. Begitu juga, kepemilikan institusional, kepemilikan publik, industri sensitif lingkungan, industri dekat konsumen, serta tingkat agresivitas pajak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> .
11.	(Darmawan & Idawati, 2023)	Pengaruh <i>Stakeholder Pressure</i> Dan <i>Shareholding Structure</i> Terhadap <i>Sustainability report Quality</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri sensitif lingkungan, industri dekat konsumen, dan tekanan dari pihak kreditur terbukti memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keberlanjutan.
12.	Delfy, D., & Bimo, (2022)	Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan Laporan Keberlanjutan dengan Ketidakpastian Lingkungan sebagai Variabel Moderasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan pelaporan keberlanjutan. Semakin tinggi persentase kepemilikan saham oleh institusi, semakin baik pelaporan keberlanjutan. Sementara itu, ketidakpastian lingkungan tidak memoderasi kepemilikan institusional terhadap pelaporan keberlanjutan.

13.	(Putri & Hadinugroho, 2023)	<i>Corporate Social Responsibility Disclosure And Ownership Structure: Moderating Effect Of Environmental Performance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan publik memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR, yang diperkuat oleh kinerja lingkungan, sementara kepemilikan manajemen tidak memberikan efek yang dimoderasi. Variabel kontrol memperlihatkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas signifikan, sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan.
-----	-----------------------------	---	--

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu jenis rancangan pemikiran penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi teori utama yang akan digunakan sebagai landasan utama dalam penelitian. Kerangka berpikir dalam penelitian ini akan menjelaskan secara logis terkait hubungan antar variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini variabel independen terdiri dari Kepemilikan Perusahaan yang terbagi lagi menjadi Kepemilikan Manajerial (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Kepemilikan Publik (X3), Tekanan *Stakeholder* yang terbagi menjadi dua yaitu Industri Sensitif Lingkungan (X4), Industri Dekat Konsumen (X5), Agresivitas Pajak (X6), Tekanan Regulasi Pemerintah (X7) dan untuk variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Pengungkapan *Sustainability report* (Y).

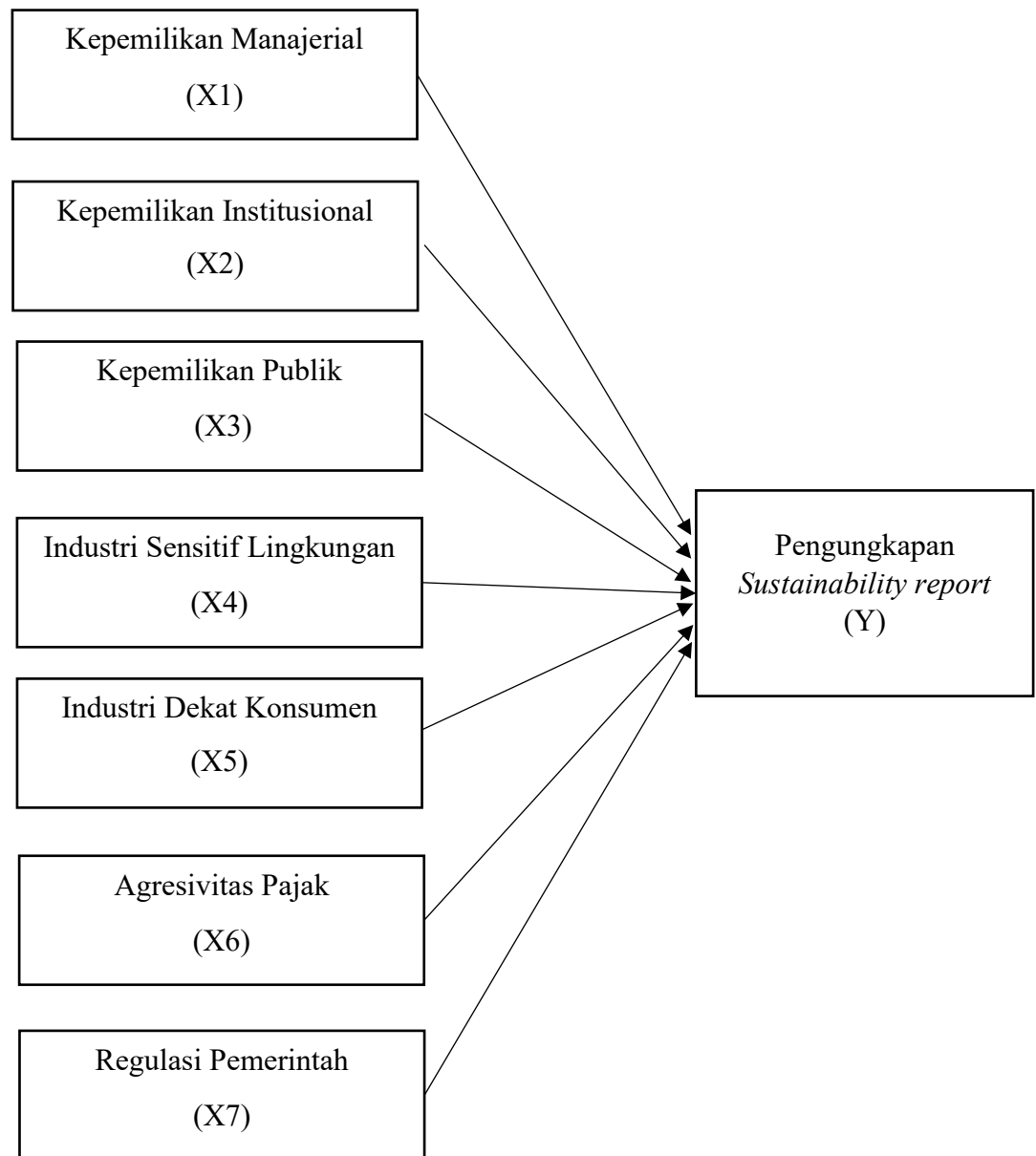
Penelitian ini menggunakan tiga teori utama yaitu teori *stakeholder*, legitimasi, dan agensi untuk menguji secara empiris kepemilikan perusahaan, tekanan *stakeholder*, agresivitas pajak, dan tekanan regulasi pemerintah terhadap pengungkapan *sustainability report*. Teori agensi digunakan untuk menjelaskan variabel kepemilikan perusahaan karena teori ini menjadi dasar untuk menjelaskan bahwa pengungkapan *sustainability report* dapat mengurangi kesenjangan informasi dari pihak agen atau manajer dan pihak prinsipal atau pemegang saham (Rokhlinsari, 2019).

Teori kedua yaitu teori *stakeholder* yang digunakan untuk menjelaskan variabel tekanan *stakeholder* industri sensitif lingkungan dan industri dekat konsumen. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab kepada para *stakeholder* atas aktivitas operasional yang ditimbulkan melalui

pengungkapan *sustainability report* sebagai bentuk akuntabilitas dan pemenuhan ekspektasi masyarakat. Teori ketiga yaitu teori legitimasi yang digunakan untuk menjelaskan variabel agresivitas pajak dan tekanan regulasi pemerintah. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan berupaya untuk memperoleh dan mempertahankan reputasi dimata masyarakat serta menunjukkan bahwa kegiatan perusahaan sudah sesuai dengan nilai, norma, dan peraturan yang berlaku. Teori legitimasi menjadi dasar untuk menjelaskan jika perusahaan yang melakukan kecurangan dan pelanggaran hukum akan berupaya untuk mengembalikan kembali reputasi dengan mengungkapkan *sustainability report* (Rokhlinsari, 2019).

Sustainability report dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal. (Adams, 2014) menyatakan bahwa praktik pengungkapan terkait laporan sosial dan lingkungan cenderung akan meningkat ketika perusahaan mendapat tekanan dari *stakeholder*, regulator, masyarakat, serta investor yang menekan transparansi yang lebih tinggi. Berbagai tekanan eksternal maupun internal tersebut mendorong perusahaan untuk lebih akuntabel terhadap dampak sosial dan lingkungannya melalui pengungkapan *sustainability report*. Oleh karena itu, struktur kepemilikan, tekanan *stakeholder*, legitimasi publik, serta regulasi pemerintah menjadi faktor yang dapat meningkatkan tingkat pengungkapan *sustainability report* yang dapat di gambarkan ke dalam kerangka konseptual pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



D. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan yang secara logis menduga adanya hubungan antara dua atau lebih variabel dalam bentuk proposisi yang dapat diuji secara empiris. Berdasarkan tujuan penelitian dan kajian pustaka maka hipotesis yang dibuat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Teori agensi menjelaskan bahwa pemilik (principal) dan manajer (agen) memiliki hubungan kontraktual dimana agen diberi wewenang oleh principal untuk mengambil keputusan atas nama principal, kondisi ini dapat menimbulkan asimetri informasi dikarenakan manajer memiliki informasi lebih banyak dan mungkin bertindak sesuai kepentingannya sendiri (Jensen & Meckling, 1976). Dalam pengungkapan *sustainability report*, teori agensi menjelaskan bagaimana pihak manajer yang juga berlaku sebagai pemilik mendorong perilaku transparansi untuk mengurangi *agency cost* dan kesenjangan informasi. Teori agensi memberikan dasar bahwa semakin besar kepemilikan manajerial, semakin tinggi dorongan untuk mengungkapkan *sustainability report* sebagai bentuk akuntabilitas untuk mengurangi konflik kepentingan.

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh pihak manajemen atau dewan direksi, sehingga keterlibatan mereka menjadi selaras dengan pemilik perusahaan (Arwidya, 2024). Kondisi ini membuat manajer tidak hanya berlaku sebagai pengelola tetapi juga pemilik yang langsung merasakan dampak reputasi maupun risiko perusahaan yang timbul. Dengan demikian manajer cenderung meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik, salah satunya dengan pengungkapan *sustainability report* untuk memperlihatkan bahwa mereka menjalankan aktivitas perusahaan selaras dengan kepentingan pemilik.

Argumen ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arwidya (2024) dan Wahyudi (2023) dengan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Penelitian lain juga dilakukan oleh Alfiani (2025) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Konsistensi hasil penelitian terdahulu menjadi landasan dari pengambilan hipotesis pertama yaitu :

H1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

2. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer), di mana perbedaan kepentingan dapat menimbulkan konflik

kepentingan (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks kepemilikan institusional, lembaga institusional seperti perusahaan asuransi dan lembaga keuangan bertindak sebagai prinsipal dimana lembaga ini memiliki kekuatan pengawasan terhadap agen (manajer) dalam menjalankan tugasnya agar selaras dengan kepentingan pemilik dan mengurangi kesenjangan informasi. Salah satu bentuk pengurangan kesenjangan informasi adalah dengan pengungkapan *sustainability report* sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kinerja perusahaan kepada pihak institusional atau prinsipal yang memiliki kepentingan jangka panjang terhadap perusahaan.

Kepemilikan institusional merujuk pada struktur kepemilikan saham yang dimiliki entitas besar seperti dana pensiun, bank, perusahaan asuransi, dan lain sebagainya yang memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan. Pihak -pihak tersebut memiliki kepentingan jangka panjang guna melindungi hak – haknya di perusahaan, untuk itu kepemilikan institusional atau prinsipal akan menekan pihak agen atau manajer untuk melaporkan kinerja perusahaan secara transparan guna melindungi citra perusahaan dan mengurangi asimetri informasi. Semakin besar proporsi saham yang dimiliki institusional, maka akan semakin transparan pengungkapan *sustainability report* yang dilakukan manajer.

Argumen tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyudi (2023), Delfy & Bimo (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Penelitian lain juga dilakukan oleh Saptowinarko Prasetyo, (2024) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Konsistensi hasil penelitian terdahulu mendukung hipotesis kedua penelitian ini yaitu:

H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

3. Kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal atau pemilik dengan pihak agen atau manajer sering menimbulkan konflik dikarenakan kesenjangan informasi. Pemegang saham publik (principal) tidak memiliki akses langsung terhadap informasi internal seperti manajer (agen) (Jensen & Meckling, 1976). Kondisi ini membuat pemegang saham publik sangat bergantung pada manajer

mengenai informasi yang diperoleh. Teori agensi menjelaskan bahwa untuk mengurangi kesenjangan informasi tersebut, manajer akan terdorong untuk mengungkapkan *sustainability report* secara transparan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pemegang saham publik.

Kepemilikan saham publik merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh publik seperti masyarakat atau investor individu. Informasi yang diperoleh oleh pemegang saham publik bergantung pada pengungkapan yang dilakukan manajer. Semakin banyak saham perusahaan yang dimiliki oleh publik maka akan semakin besar tekanan terhadap manajer untuk mengungkapkan informasi perusahaan salah satunya yaitu *sustainability report*. Dorongan ini membuat manajer lebih berhati-hati dan terbuka mengenai informasi yang diungkapkan.

Argumen ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri & Hadinugroho, (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan publik berpengaruh dalam pengungkapan CSR, serta penelitian oleh Wahyudi, (2023) juga menyatakan bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil penelitian terdahulu ini mendukung hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu:

H3 : Kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

4. Industri sensitif lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*

Stakeholder merupakan kelompok atau individu yang dapat memengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan (Freeman, 1984). Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemegang saham saja, tetapi juga kepada masyarakat, konsumen, dan lingkungan hidup. Dalam konteks industri sensitif lingkungan, teori *stakeholder* relevan untuk menjelaskan bagaimana industri yang memiliki dampak lebih besar terhadap sekitar akan mendapat dorongan lebih besar pula untuk pertanggung jawabannya. Perusahaan harus memenuhi ekspektasi dari *stakeholder* agar dianggap akuntabel melalui pengungkapan *sustainability report* atas dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan.

Industri sensitif terhadap lingkungan adalah industri yang aktivitas operasionalnya memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, perusahaan ini meliputi industri dalam sektor pertambangan, energi, dan kimia. Perusahaan ini memiliki dampak tinggi terkait pencemaran udara, tanah, serta eksploitasi sumber daya alam. Industri yang beroperasi dengan memiliki dampak bagi lingkungan sekitar dituntut untuk lebih menunjukkan pertanggungjawaban melalui pengungkapan *sustainability report*. Semakin tinggi risiko pencemaran lingkungan, maka semakin kuat dorongan dari para *stakeholder* untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan.

Argumen ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Idawati, (2023), Wahyudi, (2023), dan Saputro *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa industri sensitif lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Konsistensi hasil penelitian ini mendasari hipotesis keempat yaitu:

H4 : Industri sensitif lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

5. Industri dekat konsumen berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*

Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya dituntut bertanggung jawab kepada pemegang saham saja tetapi juga harus bertanggung jawab dengan para *stakeholder*. *Stakeholder* merupakan pihak individu atau kelompok yang memengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh tujuan perusahaan (Freeman, 1984). Teori ini menjelaskan bagaimana industri yang beroperasi dekat dengan konsumen secara langsung dapat berinteraksi dengan konsumen dan mendapatkan tekanan *stakeholder* konsumen lebih tinggi untuk mengungkapkan *sustainability report* sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Industri dekat dengan konsumen merujuk pada perusahaan atau sektor yang memiliki interaksi langsung dan intens dengan pelanggan. Industri ini antara lain yaitu perusahaan pada sektor perdagangan, ritel, farmasi, dan makanan minuman. Industri ini sangat bergantung pada kepercayaan publik karena beroperasi langsung dengan pelanggan, sehingga pertanggung jawaban terhadap lingkungan juga semakin tinggi. Perusahaan yang beroperasi dekat konsumen akan lebih transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik sebagai bentuk pemenuhan tekanan

dan ekspektasi dari konsumen secara langsung. Semakin Perusahaan beroperasi dekat dengan konsumen, maka semakin tinggi Tingkat pengungkapan *sustainability report*.

Hasil penelitian terdahulu juga mendukung pernyataan ini. Penelitian yang dilakukan oleh Idawati, (2023) dan Saputro *et al.*, (2022) menyatakan bahwa industri yang beroperasi dekat dengan konsumen berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil ini mendasari hipotesis kelima pada penelitian ini yaitu:

H5 : Industri dekat konsumen berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*

6. Agresivitas pajak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan harus bertindak sesuai dengan persepsi dan nilai yang dianut oleh publik agar dapat diterima oleh masyarakat (Suchman, 1995). Teori ini menjelaskan hubungan antara agresivitas pajak dengan pengungkapan *sustainability report*. perusahaan akan mengungkapkan informasi tertentu agar dipandang telah beroperasi sesuai dengan nilai dan norma masyarakat Deegan, (2000) di dalam Rokhlinasari, (2016). Ketika perusahaan melakukan kecurangan seperti agresivitas pajak, maka tindakan ini akan menurunkan legitimasi di mata masyarakat karena dianggap telah mengurangi kontribusi pajak bagi negara. Kondisi tersebut memicu tekanan sosial dan perusahaan akan mengungkapkan *sustainability report* sebagai strategi untuk mengembalikan kembali citra di masyarakat.

Agresivitas pajak merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya melalui beberapa cara seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Tindakan ini dapat dinilai negatif oleh masyarakat, sehingga untuk mengembalikan kembali citra perusahaan akan meningkatkan pengungkapan *sustainability report* sebagai bentuk legitimasi sosial. Semakin agresive perusahaan meminimalkan beban pajaknya, maka semakin tinggi pengungkapan *sustainability report*.

Argumen ini didukung oleh pernyataan peneliti terdahulu yaitu penelitian oleh Wahyudi, (2023) dan Halimah *et al.*, (2025) yang menyatakan bahwa

agresivitas pajak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil penelitian ini menjadi dasar hipotesis keenam dalam penelitian ini yaitu:

H6 : Agresivitas pajak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

7. Tekanan regulasi pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan harus beroperasi sesuai dengan nilai, norma, dan peraturan yang berlaku untuk memperoleh legitimasi dimata publik (Suchman, 1995). Salah satu cara untuk mendapatkan legitimasi publik adalah dengan mematuhi peraturan yang telah dibuat, seperti regulasi POJK No.51/POJK.03/2017 yang mengatur tentang kewajiban perusahaan dalam mengungkapkan *sustainability report*. Regulasi ini menjadi dorongan eksternal untuk perusahaan dalam berperilaku transparan dan bertanggung jawab terhadap aktivitas operasionalnya yang dimuat dalam sebuah laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 mewajibkan perusahaan publik di Indonesia untuk menyusun dan mengungkapkan laporan keberlanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Sebelum diterbitkannya regulasi ini, perusahaan di Indonesia mengungkapkan *sustainability report* dengan sukarela. Regulasi ini menjadi dorongan eksternal yang memengaruhi pihak manajemen untuk lebih meningkatkan kepatuhan terutama pengungkapan *sustainability report*, karena perusahaan harus menyesuaikan tindakannya sesuai standar hukum.

Didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari & Nugroho, (2021) dan Putra *et al.*, (2023) yang menunjukkan hasil bahwa tekanan regulasi pemerintah POJK 2017 berpengaruh terhadap peningkatan pengungkapan *sustainability report*. Temuan-temuan ini mendukung hipotesis ketujuh penelitian ini yaitu:

H7 : Tekanan regulasi pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*